ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN GERBANGKERTOSUSILA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-1014

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Andreas Rizkiadi Yuniasto Wibowo
125020101111030

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN GERBANGKERTOSUSILA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-1014

Yang disusun oleh :

Nama	:	Andreas Rizkiadi Yuniasto Wibowo
NIM	:	125020100111030
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 09 Agustus 2016

Malang, 12 Agustus 2016

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS.

NIP. 19520415 197412 1 001

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Satuan Wilayah Pembangunan GERBANGKERTOSUSILA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

Andreas Rizkiadi Yuniasto Wibowo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
arislibra21@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran adalah masalah perekonomian makro yang sudah yang dialami setiap negara di dunia termasuk di Indonesia. Satuan Wilayah Pembangunan GERBANGKERTOSUSILA(Gresik ,Bangkalan,Kabupaten Mojokerto,Kota Mojokerto,Kota Surabaya,Kabupaten Sidoarjo,Lamongan) yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang termasuk sebagai bagian dari Negara Indonesia, juga mengahadapi masalah yang sama. Penanggulangan pengangguran yang efektif memerlukan upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja secara komprehensif dari tahun ke tahun. Fokus utama dari pengurangan pengangguran adalah tentang bagaimana meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja lebih banyak angkatan kerja yang mampu terserap.peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu Pertumbuhan Ekonomi,Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Penanaman Modal Asing(PMA), serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kabupaten/Kota, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di satuan wilayah pembangunan Gerbangkertosusila di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data panel yaitu data kombinasi antara time series dan cross section. Data time series yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2009-2014. Selanjutnya untuk data cross section menggunakan 7Kabupaten/Kota yang tergabung dalam GERBANGKERTOSUSILA. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model(REM) karena hasil uji pemilihan model menunjukkan angka yang sesuai dengan kriteria model tersebut.hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, tingkat upah minimum(UMK) menunjukkan hubungan yang negative dan signifikan, PMA dengan hasil positif dan signifikan, sedangkan PMDN menunjukkan hasil yang positif tetapi tidak signifikan.

Kata kunci:Penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri.

A. PENDAHULUAN

Terciptanya pembangunan nasional yang efektif merupakan indikator utama yang menjadi tujuan pemerintah demi kemakmuran suatu negara. Pembangunan nasional memiliki definisi yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro,2000:10). Pembangunan itu sendiri mempunyai tujuan inti dalam proses pelaksanaannya yaitu meningkatkan persediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad,2010:11).

Fenomena ketenagakerjaan mengenai masalah pengangguran di Indonesia tersebut juga terjadi pada seluruh provinsi yang berada di lingkup Jawa-Bali pada beberapa tahun terakhir ini. Data mengenai tren angkatan kerja di pulau Jawa pada 2011-2013 bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Perkembangan Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2008 (Agustus) dan 2013 (Februari).

PROVINSI	TPT (%)		Δ 2008-2013	PT (jiwa)		Δ 2008-2013
	2008	2013		2008	2013	
DKI Jakarta	12,16	9,94	2,22	580.511	513.2	67.311
Jawa Barat	12,08	8,90	3,18	2.263.584	1.815.300	448.284
Jawa Tengah	7,35	5,57	1,78	1.227.308	941.4	285.908
D.I. Yogyakarta	5,38	3,80	1,58	107.529	72.5	35.029
Jawa Timur	6,42	4,00	2,42	1.296.313	804.4	491.913
Banten	15,18	10,10	5,08	656.56	552.9	103.66
Bali	3,31	1,89	1,42	69.548	45.4	24.148
P. JAWA+BALI	**9,01**	**6,56**	**2,45**	**6.201.353**	**4.745.100**	**1.456.253**
INDONESIA	**8,39**	**5,92**	**2,47**	**9.394.515**	**7.170.500**	**2.224.015**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di beberapa provinsi di pulau jawa memiliki persentase yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase TPT Indonesia maupun pulau Jawa sendiri. Salah satu provinsi yang mengalami tingkat TPT lebih rendah adalah provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi ketenagakerjaan di Jawa Timur baik dari sisi pengangguran maupun dari sisi efektivitas penyerapan tenaga kerja. Gambaran umum tentang Tingkat Pengangguran.

Grafik 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur terhadap Nasional

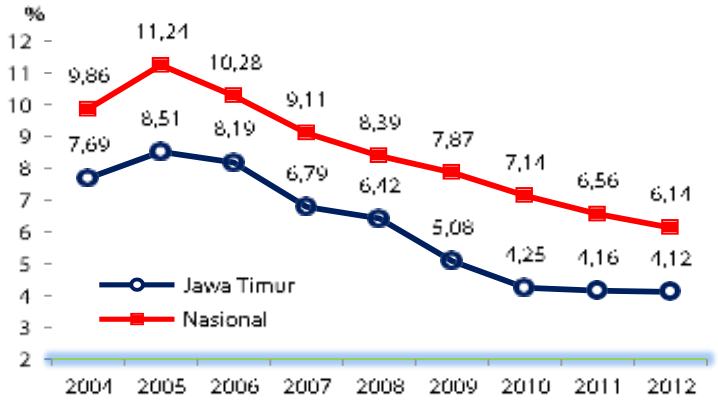

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan fenomena penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2005 hingga 2012 seperti yang tercatat pada data diatas. Persentase TPT di Jawa Timur selalu berada dibawah persentase TPT Indonesia.

Pembangunan nasional sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan dalam pembangunan ekonomi dapat diukur dari kesuksesan realisasi peningkatan pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun berikutnya. Menurut Boediono (2009:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor tingkat upah dan sistem pengupahan yang berlaku juga turut memberikan dominasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang terkait dengan upaya penyerarapan tenaga kerja. Proses penetapan upah di setiap daerah menggunakan kebijakan upah minimum untuk sektor formal. Menurut Devanto dan Putu (2011) bahwa upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan terendah sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun keluarganya. Selama proses perkembangannya, upah minimum selalu meningkat pada tahun selanjutnya, hal tersebut disebabkan karena penetapan upah minimum mengacu pada adanya inflasi dan biaya hidup standar/Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terus meningkat setiap tahunnya. Upah riil rata-rata pekerja, yang dihitung sesuai inflasi, hanya mengalami kenaikan tipis atau tetap sama selama beberapa tahun belakangan ini. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan upah nominal, pertumbuhan upah riil rata-rata berjalan lamban.

Dalam memajukan proses pembangunan ekonomi serta memaksimalkan upaya penyerapan tenaga kerja, faktor investasi baik dari dalam negeri(PMDN) maupun dari luar negeri(PMA) juga sangat berpengaruh dalam realisasi penyediaan lapangan pekerjaan baru. Investasi yang dimaksudkan adalah bentuk penanaman modal untuk ekspansi usaha maupun pendirian perusahaan baru yang mana pada akhirnya perusahaan tersebut mampu melakukan penyerapan angkatan kerja yang tersedia.

Menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996. Penetapan kerja sama ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan antar daerah di wilayah satuan pembangunan tersebut. Wilayah satuan pembangunan yang terdapat di Jawa Timur adalah Gerbangkertosusila yang beranggotakan 7 Kabupaten/Kota yang diantaranya terdiri dari Kabupaten Gresik, kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan. Kawasan ini serupa dengan istilah JABODETABEK di Jawa Barat yang pusatnya berada di Kota Jakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang penyerapan tenaga kerja di kawasan GERBANGKERTASUSILA karena wilayah ini merupakan satu-satunya satuan wilayah pembangunan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang mana Surabaya menjadi pusat pada Gerbangkertosusila. Wilayah Gerbangkertosusila ini mampu mendominasi perekonomian Jawa Timur sebesar kurang lebih 50%, hal ini disebabkan karena letaknya yang strategis dan berdekatan dengan pusat kota di Jawa Timur yaitu Surabaya yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur.

B. KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Ketenagakerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik, Tenaga Kerja adalah penduduk yang sudah termasuk dalam usia kerja (15 tahun atau lebih)/angkatan kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Dalam bidang ketenagakerjaan, terdapat beberapa istilah yang berhubungan erat dalam ketenagakerjaan, yaitu:

1. Bekerja

   Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam

(tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

2. Pekerja

   Pekerja adalah jumlah angkatan kerja/tenaga kerja yang sedang bekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu.

3. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja

   Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panenan, mogok dan sebagainya.
   Contoh:

   a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
   b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
   c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya

4. Penganggur terbuka
   a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
   b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
   c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
   d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

5. Mencari pekerjaan

   Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

   1. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
   2. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
   3. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Penyerapan tenaga kerja berkaitan erat dengan adanya keseimbangan interaksi antara permintaan dan penawaran kerja. Secara bersamaan, permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan tingkat upah dan penggunaan tenaga kerja keseimbangan. Permintaan dan penawaran tenaga kerja dibutuhkan dalam menganalisis pasar. Analisis tenaga kerja didasarkan pada asumsi bahwa permintaan tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya. Hal ini akan berhubungan dengan produktivitas kerja para tenaga kerja karena berhubungan dengan kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut Simanjuntak (1998), jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah berlaku. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja dan tingkat upah berlaku yang kemudian dipakai sebagai acuan atau pertimbangan baik oleh individu maupun perusahaan di daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara baik negara berkembang maupun maju, tentunya diperlukan indikator kusus untuk mengatuhi kinerja dari pembangunan yang sedang dilakukan. Salah satu indikator yang sering digunakan oleh setiap negara untuk mengetahui kinerja perekonomiannya yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional dengan meningkatnya pendapatan perkapita dalam suatu periode perhitungan tertentu. Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan PDRB akan berhubungan dengan

tingkat pengangguran, Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output(pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi mengaitkan dan menghitung antara tingkat pendapatan nasional dari satu periode ke periode berikutnya.

Tingkat Upah

Menurut Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten, tingkat upah subsisten yaitu upah yang hanya cukup untuk sekedar bertahan hidup. Smith juga berpendapat bahwa tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh proses Tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi akan terjadi apabila laju permintaan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja.

Kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja berdampak besar pada perekonomian. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menetukan tingkat upah (Mankiw, 2003). Tingkat upah alami (*natural wage*) naik secara proporsional dengan standart hidup masyarakat. Dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontibusi mereka dalam produksi barang dan jasa.

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, Bab I, pasal 1, Ayat 30): Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat. pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Penetapan upajh minimum merupakan suatu wujud sistim pengupahan yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah supaya dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Menurut Sumarsono (2009:151), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu : (a) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya (b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang (c) menyediakan insentip untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Selanjutnya Sumarsono (2009:201) menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak.

Investasi (PMA dan PMDN)

Investasi dan tingkat upah mempunyai peranan dalam menciptakan kesempatan kerja. Peningkatan upah akan mempengaruhi dalam perluasan kesempatan kerja di suatu daerah. Begitu pula peningkatan dalam investasi dalam negeri maupun asing berperan dalam mempengaruhi kesempatan kerja di suatu daerah. Dalam usaha mewujudkan masyarakat lebih sejahtera maka diperlukan adanya ketersediaan jumlah kesempatan kerja yang seimbang dengan tenaga kerja yang ada. Investasi atau pembentukan modal merupakan solusi yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah perekonomian negara terutama bagi negara yang sedang berkembang. Menurut Sukirno (2010) investasi biasanya disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan dan pemerintah secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal baik untuk mendirikan

perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi. Maka istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Bentuk investasi yang dimaksud bisa berupa Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) maupun Penanaman Modal Asing(PMA). Menurut Todaro(2003) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara adalah akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik,dan sumberdaya manusia. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output(produk) dan pendapatan di kemudian hari. Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di daerah tersebut, sehingga hasil akhir dari penanaman investasi tersebut akan menciptakan sumberdaya manusia yang lebih terampil dan dapat memperlancar kegiatan produktif. Biasanya tujuan yang paling umum dari kegiatan investasi adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai upaya perluasan kesempatan kerja.

Indeks Pembangunan Manusia

Seiring perkembangan zaman, maka kebutuhan setiap orang akan meningkat, baik kebutuhan pokoknya maupun kebutuan yang bersifat sekunder. Pada saat ini kebutuhan pokok seseorang bukan saja berupa sandang, pangan, dan papan, numun pada saat ini tingkat pendidikan, kesehatan, dan keehidupan layak merupakan kebutuhan pokok setiap penduduk yang harus terpenuhi. Tidak setiap penduduk bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak, akibat dari keterbatasan yang dimiliki, yaitu pendapatan .Dibutuhkan peran pemerintah guna memenuhi perkembangan kebutuhan pokok masyarakat yang berupa pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Pemerintah melalui program-programnya dapat melakukan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang dirasa sangat penting. Pemerintah saat ini juga telah menetapkan, bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting dalam agenda pembangunan.

Mengingat pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak masyarakat dalam pembangunan, maka diperlukan ukuran kusus guna mengetahui tingkat perkembangan pembangunan di ketiga aspek kebutuhan masyarakt tersebut. Alat ukur yang selama ini digunakan yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS (2015) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Pengeluaran Pemerintah

Dalam konteks negara, maka aspek keuangan akan sangat terkait dengan adanya anggaran *(budget)*. Didalamnya mengandung implikasi akan adanya penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan aktivitas negara dalam rangka mencapai target dan sasaran pembangunannya. Dalam hal ini keuangan negara merupakan keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja negara. Sumber-sumber pendapatan negara dibedakan atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang merupakan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Menurut Musgrave (dalam Simanjutak, 2012:194)) fungsi pemerintah ada tiga; yakni fungsi penyediaan barang publik, fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi stabilisasi ekonomi. Fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik mendapat kritikan mengenai dalam hal efisiensi. Sehingga menjadi perdebatan, apakah sistem sentralistik lebih baik, atau sistem desentralisasi lebih baik Pada desentralisasi, penyediaan barang publik oleh pemerintahan daerah awalnya dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari permasalahan terkait penyediaan barang publik. Namun pada kenyataan di lapangan, pemerintahan daerah tidak semuanya mampu melaksanakan desentralisasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah atas beban tanggung jawab penyediaan barang publik.

Hipotesis Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan oeleh penulis seperti diatas, maka penulis menetapkan hipotesis penelitian atau dugaan sementara dalam penelitian ini untuk pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Upah Minimum(UMP),Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap tingginya tingkat penyarapan tenaga kerja di satuan wilayah Gerbangkertosusila(Gresik,Bangkalan,Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya,Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan Periode 2009-2014 adalah :

1. Variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah Gerbangkertosusila.
2. Variabel Tingkat Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah Gerbangkertosusila.
3. Variabel Investasi PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah Gerbangkertosusila.
4. Variabel Investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah Gerbangkertosusila.

C. METODE PENELITIAN

Tempat/lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yaitu GERBANGKERTOSUSILA (Gresik, Bangkalan,Mojokerto,Surabaya,Sidoarjo,Lamongan). Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut sebagai objek lokasi penelitian adalah karena wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang mana pertumbuhan ekonomi daerah yang tergabung di GERBANGKERTOSUSILA relatif lebih baik jika dibandingkan dengan daerah-daera h lain di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis data panel, dimana menurut (Gujarati, 2010) data panel adalah gabungan dari data *time series* dan *cross section*

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a) Variabel Tidak Bebas *(Dependent Variable)*
   Variabel dependen/tergantung merupakan variabel yang keberadaanya mampu dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas *(independen variable)* yang turut memberi pengaruh nilai kedalam jumlah variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penyerapan tenaga kerja yang digambarkan dengan total angkatan kerja yang telah bekerja di wilayah GERBANGKERTOSUSILA pada tahun 2009-2014.
b) Variabel Bebas *(Independen Variabel)*
   Variabel independen disebut juga sebagai sebab *(presumed cause variable)* dari variabel dependen, yaitu variabel yang diduga sebagai akibat *(presumed effect variable)* Sopiah(2010).
   . Variabel bebas yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :
   1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)
   2. Tingkat Upah Minimum (UMK) (X2)
   3. Investasi PMA (X3)
   4. Investasi PMDN (X4)

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah gabungan dari data *time series* selama periode tahun 2009 sampai 2014 dan data *cross section* sebanyak 7 kabupaten/kota yaitu Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Hasil dari kombinasi data *time series* dan *cross section* menghasilkan 42 observasi. Fungsi persamaan model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut :

$$YLog_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\,it} + \beta_2 LogX_{2\,it} + \beta_3 LogX_{3\,it} + \beta_4 LogX_{4\,it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y	: Jumlah tenaga kerja yang sudah terserap di lapangan pekerjaan
X_1	: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota yang tergabung dalam satuan wilayah Gerbangkertosusila pada 2009-2014
X_2	:Tingkat Upah Minimum/UMK yang telah ditetapkan di Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila pada tahun 2009-2014
X_3	: Jumlah investasi PMA yang masuk pada setiap Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila pada 2009-2014
X_4	: Jumlah investasi PMDN yang masuk pada setiap Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila pada 2009-2014
β_0	: Koefisien Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien Regresi Variabel Bebas
i	:(data *cross section* Gerbangkertosusila 7 Kabupaten/Kota)
t	:(data *time series* Gerbangkertosusila tahun 2009-2014)
e_{it}	: Komponen error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Analisis data pada bagian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan dan hipotesis penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota,PMA,dan PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di GERBANGKERTOSUSILA di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota,PMA,dan PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di GERBANGKERTOSUSILA di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, dengan menggunakan metode *Random Effect Model* (REM) diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian ini seperti yang dituangkan pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Regresi

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/25/16 Time: 23:15
Sample: 2009 2014
Periods included: 6
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 42
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.034096	0.011053	3.084664	0.0038
X2	-0.086560	0.042294	-2.046620	0.0478
X3	0.032317	0.012377	2.610942	0.0130
X4	0.006570	0.013353	0.492028	0.6256
C	13.55369	0.880298	15.39670	0.0000

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	1.245633	0.9992
Idiosyncratic random	0.034760	0.0008

Weighted Statistics			
R-squared	0.629536	Mean dependent var	0.149036

Adjusted R-squared	0.589485	S.D. dependent var	0.052595
S.E. of regression	0.033698	Sum squared resid	0.042016
F-statistic	15.71866	Durbin-Watson stat	1.522502
Prob(F-statistic)	0.000000		
	Unweighted Statistics		
R-squared	0.021334	Mean dependent var	13.08286
Sum squared resid	35.16215	Durbin-Watson stat	0.295813

Sumber : Eviews 7, data diolah

Hasil penelitian yang didapat dari persamaan regresi yang dapat menjelaskan bagaimana bentuk pengaruh dari masing-masing variabel bebas(independent variable) pada variabel terikat (dependent variable). Persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut :

$$(Y) = 13.55369\ (Cons) + 0.034096(X1) - 0.086560 log\ (X2) + 0.032317\ Log(X3) - 0.006570\ Log(X4) + e$$

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini memiliki koefisien positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel jumlah tenaga kerja yang terserap di Gerbangkertosusila. Hal tersebut berarti apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.034096%.

Variabel Tingkat Upah/UMK dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien yang negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel jumlah tenaga kerja yang terserap di Gerbangkertosusila. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien yang tercipta sebesar – 0.086560. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 0.086560 % apabila terjadi kenaikan UMK sebesar 1%

Variabel investasi PMA dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel jumlah tenaga kerja yang terserap di daerah Gerbangkertosusila. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien yang tercipta oleh regresi sebesar 0.032317. hasil tersebut menunjukan bahwa setiap ada peningkatan investasi PMA sebesar 1%, maka jumlah tenaga kerja akan bertambah sebesar 0.032317.

Variabel terakhir yaitu investasi PMDN dalam penelitian ini memiliki nilai yang positif tetapi kurang signifikan karena dari hasil regresi data diatas didapatkan hasil probabilitas sebesar 0.6256 dimana hasil tersebut lebih tinggi dari nilai alpha yang hanya sebesar 0.05 (0.6256≥.0.05). untuk koefisien regresinya mendapatkan hasil sebesar 0.006570 yang mana hal tersebut berarti setiap adanya kenaikan 1%PMDN maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 0.006570%.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Gerbangkertosusila

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan dalam suatu daerah. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi dan juga mengindikasikan semakin baiknya kondisi perekonomian dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh setiap elemen masyarakat, baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin. Atau dalam arti pertumbuhan ekonomi yang juga disertai dengan pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat dengan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan proses produksi sehingga pada akhirnya

peningkatan proses produksi ini membutuhkan tenaga kerja yang tinggi pula untuk merealisasikannya sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap juga akan meningkat.

Hukum Okun menjelaskan bahwa apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Turunnya tingkat pengangguran seperti yang sudah dijelaskan dalam Hukum Okun tersebut berarti terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang mampu terserap. Sehingga dari teori Hukum Okun ini dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja dimana ketika variabel pertumbuhan ekonomi meningkat maka tenaga kerja yang terserap juga akan meningkat.

Penyerapan tenaga kerja juga berhubungan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.

Hasil penelitian yang dihasilkan berdasarkan olah data dengan metode regresi ini sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel jumlah tenaga kerja terserap.

Pengaruh Upah Minimum(UMK) Terhadap Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Gerbangkertosusila

Upah merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan bagi instansi penyedia lapangan pekerjaan maupun bagi pihak yang mencari pekerjaan dalam dunia ketenagakerjaan. Sedangkan upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pihak buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Penetapan upah minimum adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pihak pekerja/buruh. Kebijakan upah minimum diterapkan dengan tujuan untuk melindungi pekerja/buruh dari kesewenangan pengusaha dalam memberikan upah yang tidak layak. Sehingga dengan adanya upah minimum diharapkan pihak buruh mampu memenuhi kebutuhannya yang didasarkan atas kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup layak.

Apabila seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah yang telah ditetapkan, maka seseorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat pada rendahnya tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan serta peningkatan jumlah pengangguran.

Dalam penelitian ini variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil tersebut sudah sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian yang mengatakan bahwa naiknya upah minimum akan mengakibatkan penurunan pada penyerapan tenaga kerja di lapangan pekerjaan. Hasil pengujian variabel dalam penelitian sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Anggrainy,Kholifah,2013, serta Wijayanti,Ni Nyoman Setya Ari yang menyatakan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Penanaman Modal Asing(PMA) Terhadap Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Gerbangkertosusila

Todaro (2000:144) menyatakan pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Secara teoritis, masalah kemiskinan, pengangguran atau berbagai sektor ekonomi. Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi.

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Dalam hasil penelitian ini variabel PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja terserap. Hasil regresi penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa adanya peningkatan investasi PMA akan berdampak bertambahnya perusahaan-perusahaan baru, penambahan perusahaan inilah yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru dan mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) Terhadap Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Gerbangkertosusila

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha.

Dalam hasil regresi penelitian ini variabel Penanaman Modal Asing berpengengaruh positif tetapi tidak signifikan mempengaruhi variabel penyerapan tenaga kerja. Hasil estimasi tersebut cukup sesuai dengan teori yang dilandaskan yaitu berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Tetapi hasil regresi penelitian ini menunjukan bahwa variabel investasi PMDN berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel tenaga kerja terserap. Hasil yang hubungan yang tidak signifikan ini bisa terjadi karena penanaman modal yang terealisasi di Gerbangkertosusila rata-rata bersifat *"Capital Intensive"* atau padat modal sehingga penyerapannya tidak sebesar seperti yang dihasilkan jika penanaman modalnya bersifat *"Labor Intensive"* atau padat Karya. Adapun penyebab lain yang membuat hasil pengujian tidak signifikan karena penempatan investasi yang tidak merata di setiap Kabupaten/Kota yang mengakibatkan ketimpangan cukup besar antar daerah. Penanaman PMDN yang sangat tinggi terjadi pada daerah Gresik,Sidoarjo, dan Surabaya sedangkat di daerah lain bagian Gerbangkertosusila massih sangat kurang jumlah penanaman modalnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis maka penelitian ini menyimpulkan bahwa dari variabel-variabel bebas yang digunakan, yaitu pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Penanaman Modal Asing(PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) telah terbukti mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu jumlah tenaga kerja yang terserap dalam proses penyerapan tenaga kerja di wilayah satuan pembangunan Gerbangkertosusila. Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan dampak peningkatan juga pada proses penyerapan tenaga kerja. Alur pengaruh pertumbuhan ekonomi bermula ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka maka kapasitas produksi semakin meningkat sehingga pihak produsen/penyedia lapangan pekerjaan akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi demi kelancaran proses produksinya agar terus meningkat dan mendapatkan keuntungan yang tinggi.
2. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota mempunyai pengaruh yang akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Karena peningkatan ketetapan upah dirasa hanya akan menambah beban bagi para penyedia lapangan pekerjaan, sehingga jika tingkat upah minimum meningkat maka akan menurunkan Jumlah tenaga kerja terserap di wilayah

Gerbangkertosusila. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pertambahan standar upah minimum akan menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh penyedia lapangan pekerjaan.

3. Investasi Penanaman Modal Asing(PMA) dalam penelitian ini berdampak baik pada peningkatan tenaga kerja yang terserap. Jadi ketika ada pertambahan investasi PMA yang masuk maka jumlah perusahaan akan bertambah dan kebutuhan akan tenaga kerja meningkat. Hasil tersebut membenarkan hipotesis penelitian yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan Penanaman Modal Asing(PMA) akan membawa dampak peningkatan pula pada jumlah tenaga kerja yang terserap. Penanaman Modal Asing(PMA) yang direalisasikan di kawasan Gerbangkertosusila ini mayoritas ditujukan untuk menunjang proses produksi yang melibatkan tenaga manusia sebagai tenaga kerja produksi.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hubungan yang positif ini berarti bahwa setiap ada peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri akan meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerja. Hasil yang kurang baik dalam penelitian ini disebabkan karena mayoritas penanaman modal di Gerbangkertosusila masih difokuskan pada pendirian perusahaan di daerah tertentu seperti Surabaya,Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo Sehingga beberapa Kabupaten lainnya masih memiliki tingkat penanaman modal yang masih rendah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat disampaikan upaya peningkatan efektivitas penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, pertumbuhaan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di kawasan gerbangkertosusila. Mengingat pentingnya menjaga kestabilan ekonomi demi efektivitas penyerapan tenaga kerja di kawasan ini maka perlu adanya upaya khusus dari pemerintah daerah setempat maupun pengelola-pengelola perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut untuk tetap bersinergi dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi.
    a) Upaya yang bisa dilakukan pemerintah setempat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dapat berupa dorongan motivasi kepada masyarakat agar mampu mendirikan usaha mikro yang akan menyumbang output untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi, selain itu dengan mendirikan usaha beberapa masyarakat juga tidak lagi merasakan ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan yang terbatas.
    b) Upaya yang bisa dilakukan oleh pengelola-pengelola perusahaan baik itu perusahaan barang maupun jasa adalah memantau serta mengendalikan harga barang mereka dengan baik ketika memasuki persaingan pasar. Hal ini dilakukan supaya harga barang tetap dalam keadaan normal dan tidak menyebabkan inflasi yang mungkin akan mengganggu kestabilan pertumbuhan ekonomi.

2. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa hasil pengaruh yang diberikan oleh variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota bersifat negative dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertosusila. Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja, apabila upah meningkat produktivitas tenaga kerja juga akan meningkat baik tenaga kerja yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal. Tentunya kebijakan upah minimum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah juga harus bisa menemukan titik keseimbangan dimana antara permintaan buruh dengan penawaran pengusaha harus seimbang agar kedua belah pihak dapat melakukan tugasnya dengan baik.

3. Dari hasil penelitian ini, Investasi Penanaman Modal Asing(PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertosusila. Hal ini berarti bahwa setiap adanya penambahan PMA yang masuk akan mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja terserap sehingga hasil ini membenarkan hipotesis penelitian yang sudah ditetapkan penulis sebelum melakukan penelitian ini. Masuknya Penanaman Modal Asing dalam bentuk industri memang sangat dibutuhkan suatu daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. PMA yang sudah terealisasi sebagai Industri di

kawasan Gerbangkertosusila ini bisa dikatakan sudah sangat baik karena banyak perusahaan yang berdiri dari Modal Asing dan banyak mendominasi proses penyerapan tenaga kerja yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan gerbangkertosusila tersebut. Dalam hal ini pemerintah bisa mengupayakan untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan daerahnya yang mungkin bisa menjadi benefit bagi pihak asing supaya pihak asing tersebut tertarik berinvestasi di kawasan Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila. Dengan begitu peningkatan Penanaman Modal Asing akan terjaga dan masyarakat disekitarnya akan mendapat keuntungan dengan adanya peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

4. Dari hasil penelitian ini, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) berpengaruh secara positif tetapi masih kurang efektif terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan ketimpangan penempatan investasi yang kurang tersebar secara merata di daerah Gerbangkertosusila. Maka dari itu perlu adanya upaya yang lebih dari pemerintah daerah setempat agar mempromosikan keunggulan-keunggulan daerah masing-masing agar investor tertarik menanamkan modalnya di daerah yang sebelumnya masih kekurangan investasi PMDN. Kurangnya pemberdayaan tenaga manusia dalam perusahaan-perusahaan yang tergolong sebagai PMDN mengakibatkan angkatan kerja di kawasan Gerbangkertosusila tidak mampu terserap secara efektif kedalam perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas PMDN terealisasikan dalam bentuk perusahaan padat modal/*capital intensive*, bukan padat karya/*labor intensive*. Untuk menanggulangi hambatan seperti diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah untuk menghimbau para pengelola perusahaan supaya perusahaan tersebut memanfaatkan tenaga kerja manusia dengan baik. Pemerintah juga bisa menanggulanginya dengan cara memperketat adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan menerapkan batas maksimal penggunaan mesin dalam proses produksinya misalkan 50% proses produksi menggunakan mesin dan 50% memanfaatkan tenaga kerja. Dengan begitu penggunaan tenaga mesin tidak akan mendominasi proses perusahaan dan tenaga kerja yang terserap juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggrainy,Kholifah.2013. ANALISIS DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN INVESTASI (Studi Kasus pada Kota Malang Periode 2001-2011).Malang:Universitas Brawijaya.

Arsyad, Lincoln.2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi kelima. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). *Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka(PDDA) 2013*. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Jakarta, Desember 2013

Devanto dan Putu.2011. *kebijakan upah minimum untuk perekonomian yang berkeadilan:tinjauan UUD 1945*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.Vol.5 no.2

Gujarati, Damodar N. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. (Buku 1, edisi ke 5). Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati dan Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat

International Labour Organization Kantor ILO untuk Indonesia**.** *Tren Ketenagakerjaan danSosial di Indonesia 2013: Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan***.** Cetakan Pertama 2013. *ILO Katalog dalam terbitan*. International Labour Offi ce – Jakarta

Peraturan Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum. 2013. Jakarta

Satria, Dias. 2015. *Analisis Regresi : Model Data Panel*. http://www.diassatria.com diakses pada 27 Februari 2015.

Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sukirno, Sadono. 2008. *Mikro Ekonomi.Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers

Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Todaro, Michael P. 1987. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi ketiga, jilid 1*. Jakarta: Erlangga

Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid I. Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.

Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Kelima, Edisi ketujuh, Jakarta : Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan, jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta.

Wijayanti,Ni Nyoman Setya Ari dan Ni Luh Karmini**.** 2013. Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 3 [10] : 460-466 ISSN: 2303-0178.Bali:Universitas Udayana.